

PERAN UNITED NATION INTER AGENCY PROJECT ON HUMAN TRAFFICKING DALAM MENANGANI HUMAN TRAFFICKING DI THAILAND

Author : Neli Agustiana

email: neli.agustiana0070@student.unri.ac.id

Pembimbing : Ahmad Jamaan, S.IP.Si

email: ahmad.jamaan@lecturer.unri.ac.id

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya JL.H.R Soebrantas KM 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

ABSTRACT

UNIAP is an international organization under the United Nations that focuses on Nations that focuses on human trafficking with six membership countries such as Thailand, Myanmar, Cambodia, Laos, Vietnam and China. UNIAP is an inter-agency project of the United Nations (the only agency in the UN system that focuses on human trafficking).

This research is based on the theory of the role of international organizations according to Clive Archer, which contains the role of international organizations as arenas, instruments and actors. The data was collected using a qualitative methodology, most of the data published by the official website of UNIAP, the Government of Thailand, books and journals related to human trafficking in Thailand.

The results of this study indicate that UNIAP plays a role in overcoming human trafficking in Thailand. First, as an arena in various ethics training activities, media, as well as training on handling human trafficking cases. Second, as an instrument to establish cooperation with COMMIT to produce a Memorandum of Understanding in six UNIAP members on October 29, 2004. Third, as an actor, in carrying out educational programs for children in Thailand in providing education about HIV/AIDS. Fourth, acting as an actor in making hotlines around 10% per month for reports on cases of human trafficking. Fifth, acting as an actor who collaborates with various institutions, in the level of success of UNIAP in establishing 20 international and regional partners, while in the level of failure, UNIAP runs three collaborators with various partners.

Keywords: Human Trafficking, Exploitation, Thailand.

Pendahuluan

Penelitian ini akan menjelaskan permasalahan human trafficking yang ada di Thailand serta mengeksplorasi peran *United Nation Inter Agency Project on Human Trafficking* (UNIAP) dalam menangani permasalahan tersebut melalui program-program yang dijalankan oleh UNIAP. Dalam dunia internasional, bentuk paling umum dalam perdagangan

manusia adalah perdagangan seks dan perdagangan tenaga kerja. Menurut laporan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) 79% bentuk perdagangan manusia yang paling umum adalah perdagangan seks dan 18% bentuk kedua yang paling umum adalah perdagangan tenaga kerja.¹ Bentuk lain

¹<https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/global-report-on-trafficking-in->

dari perdagangan manusia ialah adanya pernikahan paksa, kegiatan kriminal paksa, pengemis paksa serta perdagangan organ.²

Perdagangan manusia adalah kejahatan internasional yang ditentang di semua negara. Akan tetapi, tingkat kejahatan ini terus meningkat dalam 10 tahun terakhir. Menurut data Departemen Riset Statista dunia, jumlah korban perdagangan manusia terus bertambah dari tahun 2008 sampai 2019 mengalami peningkatan tiga kali lipat dari 30.961 menjadi 105.787.³ Pada tahun 2020 jumlah korban meningkat menjadi 109.216 di seluruh dunia.⁴

Menurut laporan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada tahun 2018, Amerika Serikat sebagai salah satu negara terburuk di dunia untuk perdagangan manusia.⁵ Tidak heran adanya kasus perdagangan manusia di Amerika Serikat pada tahun 2011 sampai 2018, mengenai perdagangan seks yang memperdagangkan ratusan perempuan di seluruh wilayah Amerika Serikat dengan pelaku yang bernama Blackmore atau sering disebut dengan “*Macknificent*”. Blackmore telah melakukan kekerasan terhadap perempuan dengan cara menampar, meninju, mencekik, menendang korban, dan membakar bagian tubuh korban dengan rokok. Blackmore membuat bisnis organisasi perdagangan manusia dengan memasang iklan seks komersial secara online dan memesan perjalanan lintas negara di New York dan Hawaii. Blackmore mengancam perempuan untuk

menanto bagian tubuhnya dengan nama “*Macknificent*” sebagai tanda kesetiaan mereka kepadanya. Maka Blackmore menghadapi hukuman penjara seumur hidup.⁶

Selain kasus yang terjadi di Amerika Serikat, kasus perdagangan manusia juga melibatkan kawasan di Asia Tenggara, seperti di Thailand, Kamboja, Laos, Myanmar, Indonesia, Filipina, Singapura. Menurut data Departemen Riset Statista Thailand pada tahun 2014 sampai tahun 2017 Thailand menjadi negara yang paling banyak mengalami kasus korban perdagangan manusia di Asia Tenggara.⁷

Tabel. 1
Jumlah Korban Perdagangan Manusia

Tahun	Negara				Jenis kelamin			jumlah
	Mianmar	Thailand	Laos	Kamboja	Dili	L	P	
2014	98	303	108	29	57	190	405	595
2015	409	360	87	9	177	451	531	982
2016	238	333	58	52	143	411	413	824
2017	53	327	30	26	19	88	367	455

Sumber: *Ministry of Social Development and Human Security* (2017)

Pada tabel 1, menunjukkan adanya jumlah korban kasus perdagangan manusia di Asia Tenggara dengan puncak tertinggi kasus yang paling banyak adalah Negara Thailand. Selain itu, perempuan menjadi korban tertinggi dalam kasus perdagangan manusia di Asia Tenggara dibandingkan dengan laki-laki.

Adapun faktor yang menyebabkan negara Thailand menjadi negara dengan jumlah korban tertinggi di Asia Tenggara dalam kasus perdagangan manusia adalah

persons.html diakses Kamis 21 Oktober 2021 11:25 WIB

²https://www.ihmiskauppa.fi/en/human_trafficking/human_trafficking_across_the_world diakses Senin 11 Oktober 2021 11:40 WIB

³https://www.statista.com/topics/4238/human-trafficking/#topicHeader_wrapper diakses Senin 11 Oktober 2021 17:03 WIB

⁴<https://www.statista.com/statistics/459637/number-of-victims-identified-related-to-labor-trafficking-worldwide/> diakses pada Senin 11 Oktober 2021 17:05 WIB

⁵<https://www.foxnews.com/us/human-trafficking-in-america-among-worst-in-world-report> diakses Kamis 21 Oktober 2021 11:40 WIB

⁶ Situs Web Resmi Departemen Kemananan Dalam Negeri <http://www.ice.gov/features/human-trafficking> diakses Senin, 11 Oktober 2021 10:21 WIB

⁷Dokumen resmi *Ministry of Social Development and Human Security. Thailand's Country Report on Anti-Human Trafficking Response* (1 January-31 December 2017)

Pertama, adanya faktor geografis Thailand yang rentan terhadap para penyeludup sehingga hal ini membuat lebih mudah bagi para pelaku *trafficker* untuk menyeludupkan orang ke negara tersebut.⁸ *Kedua*, adanya faktor hukum karena para korban seringkali menjadi pihak yang menderita penganiayaan fisik dan penuntutan enggan mencari bantuan secara hukum karena takut akan diintimidasi dan mendapat perlakuan pembalasan dari para pelaku *trafficker*.⁹ Ketiga, faktor ekonomi karena terbatasnya pendapatan membuat para korban kerap kali melakukan tindakan sukarela untuk dieksploitasi khususnya bagi para perempuan dan anak-anak yang ada di Thailand.¹⁰

Salah satu fakta mengenai kasus perdagangan manusia yang terjadi di Thailand yaitu terjadi pada tahun 2015, saat ditemukan sebuah kuburan massal di sebuah hutan Thailand dekat perbatasan Malaysia dengan jumlah korban 36 orang, adanya jaringan perdagangan manusia yang memperbudak ratusan orang.¹¹ Mereka adalah korban perdagangan manusia yang diperbudak seperti yang dilaporkan polisi bahwa mayat tersebut merupakan migran Rohingnya dari Burma dan Bangladesh yang meninggal karena kelaparan atau penyakit serta dibunuh oleh jaringan perdagangan manusia. Hal tersebut merupakan kasus perdagangan manusia terbesar di Thailand.¹²

Kasus lainnya di Thailand dimana adanya perdagangan anak di bawah umur

yang dieksploitasi sebagai pelayan bagi para pejabat-pejabat tinggi di Thailand. Pada penghujung tahun 2016, seorang ibu melaporkan anaknya yang menjadi korban kejahatan transnasional dengan cara memaksa, menipu dan mengancam anaknya dijadikan sebagai perdagangan manusia.

UNIAP didirikan pada tahun 2000 yang bertujuan untuk memfasilitasi serta merespon permasalahan *human trafficking* pada wilayah Greater Mekong Sub-Region (GMS) serta diatur oleh kantor manajemen regional yang ada di Thailand. Selain di Thailand, UNIAP juga mempunyai wilayah operasi lainnya seperti Kamboja, Tiongkok, Laos, Myanmar dan Vietnam.

Hasil dan Pembahasan

Sejarah Masuknya *Human Trafficking* di Thailand

Perdagangan manusia merupakan suatu pergerakan fisik orang yang melintasi perbatasan melalui cara-cara menipu, paksaan dan kekerasan. Orang-orang yang melakukan tindak pidana perdagangan manusia dilatarbelakangi oleh eksploitasi yang terus menerus terhadap korbannya sampai di negara tujuan.¹³ Adapun definisi perdagangan manusia memiliki tiga elemen inti, yakni pertama, tindakan perdagangan yang berarti perekrutan, pengangkutan, pemindahan, atau penerimaan orang. Kedua, sarana perdagangan yang meliputi ancaman atau penggunaan kekuatan, penipuan, pemaksaan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan. Ketiga, tujuan dari perdagangan yang selalu berkaitan dengan eksploitasi.

Masuknya perdagangan manusia ke Negara Thailand pada tahun 1980an ketika banyaknya orang-orang Myanmar atau imigran gelap yang melarikan diri dari penganiayaan politik di negaranya. Hal ini

⁸<https://borgenproject.org/10-facts-about-human-trafficking-in-thailand/> diakses Minggu, 28 November 2021 12:30 WIB

⁹<https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2018/09/human-trafficking-in-southeast-asia-caballero.htm> diakses Minggu 28 November 2021 12:44 WIB

¹⁰<http://thlawforum.com/articles/Trafficking-in-Thailand%20.html> diakses Minggu 28 November 2021 15:18 WIB

¹¹<https://www.nytimes.com/2017/07/19/world/asia/thailand-human-trafficking-case.html> diakses Selasa, 12 Oktober 2021 22:00 WIB

¹²<https://www.hrw.org/news/2017/07/24/thailand-trafficking-convictions-important-step-forward> diakses Selasa, 12 Oktober 2021 33:32 WIB

¹³<https://www.afp.gov.au/what-we-do/crime-types/human-trafficking> diakses Selasa 30 November 2021 15:14 WIB

bertepatan dengan adanya pengupahan terhadap para imigran yang lebih sedikit dengan masyarakat asli Thailand. Oleh karena itu para imigran dengan upah yang cukup rendah mendapatkan pekerjaan yang kurang baik sehingga membuka peluang untuk para nelayan memperkejakan para imigran gelap dalam sektor perikanan dibandingkan dengan masyarakat asli negara tersebut.

Tiga dekade berlalu, isu *human trafficking* kembali muncul bersamaan dengan munculnya krisis yang menimpa Thailand pada tahun 1998. Kemudian pada tahun 2008, terjadi tren peningkatan yang signifikan sehingga sebagian besar korban *human trafficking* dipekerjakan di industri penangkapan dan pengolahan ikan, hiburan malam, prostitusi anak dan dewasa, hingga buruh kasar. Selain itu, ada negara-negara yang menjadi tujuan perdagangan manusia adalah Malaysia, Singapura, Indonesia, Bahrain, Uni Eropa, hingga Amerika Serikat. Akan tetapi, mayoritas orang yang diperdagangkan ke Thailand berasal dari Myanmar, Laos, Kamboja dan wilayah Tiongkok Selatan, yang akan dikenakan kerja paksa atau terikat untuk eksploitasi seksual komersial.¹⁴

Upaya Pemerintah Thailand dalam Menangani *Human Trafficking* di Thailand

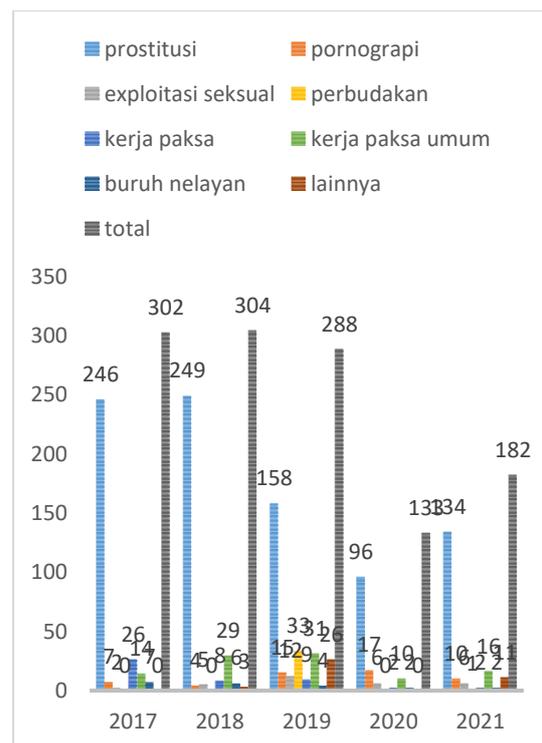
Upaya Pemerintah Thailand dalam menangani perdagangan manusia merupakan pendekatan yang sistematis yang dijalankan oleh pemerintahan Perdana Menteri Abhisit Bejajiva. Adapun upaya yang dijalankan pemerintah Thailand dalam menindaklanjuti perdagangan manusia ialah sebagai berikut;

Policy (kebijakan), Pada 2015 pemerintah Thailand kemudian

menerapkan kebijakan baru yang dinamakan dengan *5P Strategy Framework*, meliputi faktor *Policy* (kebijakan), *Prosecution* (penuntutan), *Protection* (perlindungan), *Partnership* (kemitraan) dan *Prevention* (pencegahan).

Prosecution (penuntutan), pemerintah berfokus pada penegakan hukum yang kuat dan peningkatan efisiensi dalam sistem peradilan pidana. Pada tahun 2018, Pemerintah Kerajaan Thailand terus menekankan pentingnya tindakan proaktif dalam penyelidikan, penindasan, penangkapan dan penuntutan perdagangan manusia, sejalan dengan prinsip-prinsip internasional.¹⁵

Grafik 1
Jumlah kasus perdagangan manusia di Thailand pada tahun 2017 sampai 2021



Sumber: Pemerintah Thailand Tahun 2021

Pada grafik 2.1 dapat dijelaskan bahwa jumlah kasus perdagangan manusia dari tahun 2017 sampai 2021 berdasarkan

¹⁴ Irmalia Agustina. 2016. *Ketidakefektifan Program Pemerintah Thailand dalam Menjalankan Rekomendasi UNIAP*. Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 5 No. 2, Hlm. 507

¹⁵ *Royal Thai Government's Country Report on Anti-Human Trafficking Efforts* (1 January – 31 December 2018) hlm 9

kategori perdagangan manusia memiliki kasus tertinggi yaitu prostitusi. Pada tahun 2017 mencapai 246 kasus, di tahun 2018 mengalami peningkatan mencapai 249 kasus dan ditahun 2019 sampai 2020 menurun menjadi 158 dan 96 kasus lalu naik di tahun 2021 mencapai 134 kasus.

Protection (perlindungan), Thailand terus memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban perdagangan manusia berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kemanusiaan, sesuai dengan standar internasional dan kewajiban Thailand terhadap hukum internasional yang relevan. Thailand telah menerapkan pendekatan berbasis hak asasi manusia dan berpusat pada korban, yang berfokus pada non-diskriminasi, kerahasiaan, kepentingan terbaik anak, dan kepekaan gender. Keseluruhan upaya telah meningkatkan perlindungan dan bantuan bagi korban mulai dari tahap identifikasi korban hingga pemulangan dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Perlindungan dan bantuan kepada korban dari segala bentuk perdagangan manusia tetap menjadi prioritas utama Pemerintah Kerajaan Thailand, dengan fokus pada pendekatan perawatan yang berpusat pada korban dan berdasarkan informasi trauma.

Partnership (kemitraan), Thailand telah meningkatkan kerjasamanya dengan semua pemangku kepentingan termasuk negara tetangga, organisasi internasional, sektor swasta dan LSM. Pada tahun 2018, Thailand ikut bekerja sama dengan beberapa Negara misalnya dengan Negara Myanmar. Beberapa lembaga di Thailand seperti (MHDS, polisi kerajaan Thailand, Biro Imigrasi, Kantor Kejaksaan Agung, dan kantor Kehakiman) yang ikut bekerjasama dengan polisi Myanmar, dan lembaga terkait lainnya untuk memberikan bantuan dan mempercepat pemulangan 73 korban Myanmar melalui pusat penerimaan di Myawaddy Myanmar.

Prevention (pencegahan), Pemerintah Thailand terus meningkatkan efektivitas tindakan pencegahan untuk meminimalkan risiko perdagangan

manusia di dalam dan luar negeri. Dengan demikian, kemitraan dengan semua pemangku kepentingan, termasuk LSM, organisasi internasional, negara tuan rumah pekerja migran, dan Negara penerima pekerja Thailand, telah diperkuat. Pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang tetap menjadi prioritas utama Pemerintah Kerajaan Thailand, diimbangi dengan peningkatan alokasi anggaran yang berkelanjutan untuk instansi pemerintah terkait.

Gambar. 1
Alokasi anggaran Thailand tahun 2019 untuk pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang



Sumber : Laporan Pemerintah Thailand Tahun 2019

Pada tahun 2019, Pemerintah Thailand mengalokasikan dana sebesar 3.806,82 juta THB (126.472.425 USD) untuk pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang, meningkat dari tahun 2018 sebesar 4,53 persen dan melanjutkan tren peningkatan alokasi anggaran sejak 2016.

Anggaran tersebut dilakukan untuk melakukan berbagai kegiatan kampanye seperti pada tahun 2018 MSDHS telah menghasilkan serangkaian kampanye untuk mengurangi masalah yang berkaitan dengan mengemis dan mengemis secara paksa.

Peran UNIAP Sebagai Arena Pertemuan Antar Lembaga dalam Memerangi Perdagangan Manusia

UNIAP menyediakan pelatihan dalam penanganan kasus *human trafficking* dengan bertemu antar berbagai lembaga. Berikut beberapa pelatihan yang dijalankan oleh UNIAP diantaranya:

1. Pelatihan penanganan kasus lintas batas untuk polisi di Myanmar-Thailand dan perbatasan Myanmar-Cina.
2. Pelatihan etika, identifikasi dan indikasi korban untuk polisi di Laos
3. Peningkatan kesadaran perdagangan manusia untuk agen tenaga kerja di luar negeri, Myanmar
4. Peningkatan kapasitas anti perdagangan manusia untuk LSM di Cina dan Malaysia
5. Peningkatan kapasitas anti perdagangan manusia bagi pengawas kenagakerjaan di Vietnam
6. Pelatihan komunikasi perubahan perilaku pencegahan perdagangan manusia di Kamboja dan Vietnam
7. Pelatihan tentang perdagangan manusia dan etika untuk media di semua anggota UNIAP
8. Pelatihan etika jurnalisisme anti perdagangan manusia di Tiongkok

Peran UNIAP Sebagai Instrumen dalam Menjalinkan Kerjasama Bersama COMMIT dalam Mengatasi *Human Trafficking* di Thailand

Sebagai Organisasi Internasional, UNIAP memiliki peranan untuk menjalin kerjasama hal ini diwujudkan melalui salah satu program UNIAP yaitu pembentukan *Coordinated Mekong Ministerial Against Trafficking* (COMMIT) yang memiliki komitmen untuk memperkuat kerjasama lintas batas dan aksi anti perdagangan manusia. COMMIT merupakan sebuah kebijakan yang di bentuk oleh UNIAP di kawasan Greater-Mekong Sub-region (GMS), di mana pemerintah Thailand telah

menyadari bahwa belum dapat sepenuhnya memerangi perdagangan manusia secara efektif. Sehingga hal ini menjadi suatu alat alternatif dalam membentuk kerjasama sebagai upaya pencegahan perdagangan, perlindungan korban dan pemulihan dan reintegrasi mereka, serta penuntutan bagi para pelaku *trafficker*.¹⁶

UNIAP juga menjadi saran perundingan, di bawah inisiatif COMMIT di Thailand dengan menandatangani MoU di negara Vietnam, Myanmar, Kamboja, Laos dan Cina. Kerjasama COMMIT dibentuk oleh Thailand, Vietnam, Myanmar, Kamboja, Laos, dan Cina melalui penandatanganan COMMIT MoU pada 29 Oktober 2004 di Yangon, Myanmar.¹⁷ MoU merinci pada pemahaman bersama tentang perdagangan manusia berdasarkan Protokol PBB tentang Perdagangan Manusia (Protokol Palermo). MoU didasarkan pada standar internasional tentang hak asasi manusia dan eksploitasi tenaga kerja. MoU mengikat Negara-negara pendatangan untuk memastikan bahwa orang-orang yang diperdagangkan diperlakukan sebagai korban, bukan pelanggar hukum dan berusaha untuk lebih mendukung kebutuhan dan reintegrasi mereka.

Berperan Sebagai Aktor Dalam Program Pendidikan Bagi Anak-anak di Thailand

Melalui program pendidikan, UNIAP bersama-sama dengan organisasi internasional lainnya, serta para *stakeholder* Thailand berfokus untuk memasukkan lebih banyak anak-anak ke

¹⁶Paul Cunnington and Samantha Hung. March 2009. *United Nations Inter-Agency Project on Human Trafficking in the Greater Mekong Sub-Region (UNIAP) Phase III (2007-2010)*. Hlm 20

¹⁷ Isti Nur Rahmahwati. *Evaluasi Hasil Implementasi The Coordinated Mekong Ministerial Initiative Against Trafficking Sub-Regional Plan of Action (COMMIT SPA) Dalam Menangani Human Trafficking di Thailand Periode 2011-2013*. *Journal of International Relations*, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2015, hal, 1-8

sekolah dan memastikan bahwa sekolah yang aman, bersih, dan layak untuk memberikan pendidikan yang relevan guna mempersiapkan anak-anak dimasa mendatang. UNIAP bersama-sama dengan organisasi lainnya, serta para *stakeholder* Thailand memiliki tujuan dalam melaksanakan program kerjanya di Thailand dalam melindungi setiap anak melalui pendidikan dengan membantu departemen pendidikan dalam membangun sistem untuk melacak anak-anak yang putus sekolah.

Anak-anak yang kurang beruntung untuk bersekolah guna mengikuti program yang diusung UNIAP bersama dengan organisasi internasional lainnya, serta para *stakeholder* Thailand kepada pemerintah Thailand yaitu wajib belajar selama sembilan tahun. Disisi lain organisasi ini meningkatkan pelayanan anak, seperti pelayanan anak usia dini yang berkualitas untuk mengikuti belajar tahap dasar, serta membuat sekolah non-formal masuk ke dalam rencana pendidikan nasional sesuai dengan standar agar anak-anak merasa diakui oleh negara.

Pemerintah Thailand melibatkan anak-anak dan remaja dalam pengembangan rencana strategis nasional untuk mencegah serta menghilangkan kekerasan terhadap anak yang dimulai pada tahun 2008 dan diharapkan dapat dipresentasikan untuk audiensi pada tahun 2011. Sepuluh perwakilan anak-anak dari masing-masing daerah kemudian mengikuti Musyawarah Nasional yang diselenggarakan di Bangkok pada desember 2010. Peserta anak sebanyak 142 orang (95 perempuan dan 47 laki-laki), mewakili organisasi yang bergerak di berbagai sektor, termasuk organisasi yang menangani anak di sekolah dan di masyarakat, anak-anak dari etnis minoritas, anak-anak cacat, pekerja anak, anak jalanan, anak-anak yang terkena HIV/AIDS, dll.

Peran UNIAP Sebagai Aktor Pembuatan Hotline Bagi Korban Perdagangan Manusia di Thailand

Alat yang dikembangkan UNIAP yaitu alat *skrining* seperti “Kartu Cepat” sebagai *hotline* yang berfungsi sebagai upaya penyaringan korban yang berukuran seperti kartu kredit yang diterjemahkan ke dalam bahasa Mekong dan di uji coba dengan staf penampungan Vietnam dan Cina yang bekerja di tempat penampungan untuk melayani beragam klien (termasuk tunawisma, anak jalan dan pekerja seks).

Hotline menyediakan konseling untuk sejumlah kasus sebagai arena pengaduan bagi korban *human trafficking*. Namun, ada sejumlah hambatan dalam *hotline* ini, antara lain:

1. Biaya panggilan ke penelpon
2. Operasi terbatas dari jam 8 – 9 malam
3. Nomor yang sulit diingat
4. Kurangnya koordinasi dengan mitra
5. Promosi terbatas jumlahnya
6. Kurangnya dokumentasi panggilan dalam bentuk database yang menjadi hambatan signifikan untuk memantau efektivitas *hotline*.¹⁸

Selama lebih 3,5 tahun rata-rata *hotline* ini menerima 68 panggilan perbulan, dan menerima panggilan sekitar 200 panggilan perbulan pada akhir tahun 2009 sampai 2013. Rata-rata 63% panggilan terkait mengenai masalah hak-hak buruh (mulai dari praktik eksploitatif dan meminta bantuan terkait tentang informasi pekerja migran). Sekitar 10% perbulan adanya laporan atas kasus perdagangan manusia.

Peran UNIAP Sebagai Aktor Kolaborasi Dengan Berbagai Lembaga

¹⁸United Nations Inter-Agency project on Human Trafficking(UNIAP) Phase III (2007-2013) . *Guide to Ethics and Human Rights in Counter-Trafficking*. Bangkok Hlm 59

Sebagai organisasi internasional UNIAP memainkan peranannya dalam menjalin kolaborasi sebagai bentuk upaya penanganan *human trafficking* di Thailand. Hal ini dapat dibuktikan melalui beberapa agenda yang telah dicapai sebagai upaya menangani kasus *human trafficking*. Di bawah menunjukkan beberapa kolaborasi yang dilakukan UNIAP sesuai dengan tingkat keberhasilannya. Berikut beberapa kolaborasi yang dilakukan UNIAP dengan standar keberhasilannya:

Pertama, Penyusunan Kerangka Monitoring dan Evaluasi COMMIT SPA. COMMIT Rencana Aksi Sub-Regional berkolaborasi dengan organisasi lainnya mengambil bidang keahlian masing-masing. ARTIP melakukan penuntutan, IOM melakukan perlindungan, ILO melakukan pecegahan, UNIAP melakukan kebijakan, dan UNICEF melakukan perlindungan. *Kedua*, Acara Radio di Kamboja Tentang Perdagangan Manusia. Program radio yang disiarkan diseluruh Kamboja menampilkan pembicara tamu yang berbeda tentang topik perdagangan manusia, termasuk orang-orang yang diperdagangkan, dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan mengiklankan *hotline* dan pilihan layanan untuk orang-orang yang diperdagangkan. *Ketiga*, Kolaborasi Kasus Membantu Korban Kapal Nelayan Kamboja yang Terdampar di Malaysia dan Indonesia. UNIAP berusaha membantu jaringan perdagangan manusia dengan meningkatkan sejumlah kerjasama melalui mitra internasional dan nasional dalam membantu nelayan Kamboja yang diperdagangkan oleh kapal penangkapan ikan Thailand yang terdampar di Malaysia dan Indonesia. UNIAP juga memainkan peranannya dalam mengidentifikasi korban serta membantu korban dalam proses pemulangannya, UNIAP juga berupaya agar mitra fokus pada bagaimana menekan tindak pidana perdagangan manusia ke kapal penangkapan ikan.

Keempat, Konsultasi Ahli SIREN Thailand Tentang Pengalaman Korban

Asing dalam Proses Penuntutan Thailand. Konsultasi ahli ini mempertemukan responden operasional dari sektor peradilan pidana Thailand, Burma, Kamboja dan Laos serta sektor perlindungan korban. Tujuannya adalah untuk memeriksa perlakuan dan pengalaman korban perdagangan manusia asing di Thailand yang berpartisipasi dalam proses peradilan pidana Thailand, serta mengidentifikasi tantangan untuk mendapatkan penuntutan yang berhasil. *Kelima*, Proyek Kebebasan CNN. Staf regional UNIAP dan Kamboja memperkenalkan tim jurnalis CNN's Dan *Rivers* kepada dua kelompok orang yang diperdagangkan. *Pertama*, sekelompok pria muda yang diperdagangkan ke kapal penangkap ikan Thailand, dan kedua sekelompok wanita yang diperdagangkan melalui jalur perekrutan formal ke Malaysia. Selain kolaborasi keberhasilan yang dilakukan oleh UNIAP adapula kegagalan kolaborasi yang dilakukan oleh UNIAP yaitu diantaranya ialah: *Pertama*, Lokakarya dan Pelatihan Laos dengan Media Laos dan Thailand Tentang Anti-Perdagangan Manusia Sejak tahun 2006, di bawah MoU anti-perdagangan manusia Laos, jurnalis Laos dan Thailand telah dikumpulkan selama 3-5 hari pelatihan media, yang masing-masing biasanya mencakup sekitar 80 peserta yang menghasilkan 30 draft radio spot. *Kedua*, Hari Anti Perdagangan Manusia di Kamboja dan Laos. Mitra pembangunan dan pemerintah telah mengadakan serangkaian acara peningkatan kesadaran untuk memperingati hari anti-perdagangan manusia di Kamboja dengan menggunakan spanduk, pidato, dan stan informasi termasuk beberapa pidato oleh orang-orang yang diperdagangkan. Di Laos, juga mengadakan serangkaian acara seperti pemutaran film dokumenter MTV EXIT, dan pertandingan sepak bola persahabatan. Di kedua Negara, kegiatan berlangsung di ibu kota serta di beberapa pusat provinsi lainnya.

Simpulan

Perdagangan manusia di Thailand dimulai pada tahun 1980-an ketika banyaknya orang-orang Myanmar atau imigran gelap yang melarikan diri dari penganiayaan politik di negaranya. Hal ini bertepatan dengan adanya pengupahan terhadap para imigran yang lebih sedikit dengan masyarakat asli Thailand. Maka dari itu munculnya isu-isu *human trafficking* di Thailand seperti eksploitasi seksual, kerja paksa atau perbudakan serta pemindahan organ. pemerintah Thailand dalam menangani kasus ini yaitu membuat kebijakan implementasi strategi 5P *Strategy Framework*, meliputi faktor *Policy* (kebijakan), *Prosecution* (penuntutan), *Protection* (perlindungan), *Partnership* (kemitraan) dan *Prevention* (pencegahan). Dalam penghapusan *human trafficking* tidak hanya pemerintah saja yang mengambil sikap dalam menangani masalah ini, organisasi internasional juga perlu ikut andil dalam mengatasi masalah ini yakni seperti UNIAP (*United Nation Inter Agency Project On Human Trafficking*).

United Nation Inter Agency Project On Human Trafficking (UNIAP) didirikan pada tahun 2000. UNIAP dikelola oleh kantor dan staf di kantor regional serta enam kantor proyek negara di Kamboja, Cina, Laos, Myanmar, Thailand dan Vietnam. Dalam mengatasi masalah *human trafficking* di Thailand UNIAP hadir memiliki peran sebagai organisasi internasional menurut Clive Archer yaitu diantaranya ialah : *Pertama* , berperan sebagai arena. Adanya pertemuan pelatihan etika jurnalismen anti perdagangan manusia yang dilakukan di Tiongkok dihadiri oleh perwakilan antar Negara anggota UNIAP seperti, Thailand, Kamboja, Vietnam, Laos dan Myanmar.

Kedua, berperan sebagai instrumern. UNIAP menjalankan perannya sebagai instrumen untuk menjalin kerjasama hal ini diwujudkan melalui

salah satu program UNIAP yaitu pembentukan *Coordinated Mekong Ministerial Against Trafficking (COMMIT)* yang memiliki komitmen untuk memperkuat kerjasama lintas batas dan aksi anti perdagangan manusia. *Ketiga*, Selain memiliki peranan sebagai aktor, UNIAP juga hadir dalam beberapa perannya. Yakni berperan sebagai aktor program pendidikan bagi anak-anak di Thailand. Anak-anak yang kurang beruntung untuk bersekolah guna mengikuti program yang diusung UNIAP bersama dengan organisasi internasional lainnya, serta para *stakeholder* Thailand kepada pemerintah Thailand yaitu wajib belajar selama sembilan tahun. *Keempat*, Berperan sebagai aktor pembuatan *hotline* bagi korban perdagangan manusia. *Hotline* ini berfungsi sebagai pusat layanan bagi korban *trafficking* dan sebagai arena pengaduan bagi Korban *human trafficking*. *Kelima*, UNIAP juga berperan sebagai aktor kolaborasi dengan berbagai lembaga. Dalam tingkat keberhasilan yang dijalankan, UNIAP berkolaborasi dengan 20 lembaga sedangkan dalam tingkat kegagalan, UNIAP berkolaborasi dengan 3 lembaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Isti Nur Rahmahwati. *Evaluasi Hasil Implementasi The Coordinated Mekong Ministerial Initiative Against Trafficking Sub-Regional Plan of Action (COMMIT SPA) Dalam Menangani Human Trafficking di Thailand Periode 2011-2013*. Journal of International Relations, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2015
- Paul Cunnington and Samantha Hung. March 2009. *United Nations Inter-Agency Project on Human Trafficking in the Greater Mekong Sub-Region (UNIAP) Phase III (2007-2010)*

Irmalia Agustina. 2016. *Ketidakefektifan Program Pemerintah Thailand dalam Menjalankan Rekomendasi UNIAP*. Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 5 No. 2

Ministry of Social Devekopment and Human Security. *Thailand's Country Report“ on Anti-Human Trafficking Response* (1 January-31 December 2017)

Royal Thai Government's *Country Report on Anti-Human Trafficking Efforts* (1 January – 31 December 2018)

United Nations Inter-Agency project on *Human Ttrafficking*(UNIAP) Phase III (2007-2013) . *Guide to Ethics and Human Rights in Counter-Trafficking*. Bangkok

<https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/global-report-on-trafficking-in-persons.html> diakses Kamis 21 Oktober 2021 11:25 WIB

https://www.ihmiskauppa.fi/en/human_trafficking/human_trafficking_across_the_world diakses Senis 11 Oktober 2021 11:40 WIB

https://www.statistia.com/topics/4238/human-trafficking/#topicHeader_wrapper diakses Senin 11 Oktober 2021 17:03 WIB

<https://www.statista.com/statistics/459637/number-of-victims-identified-related-to-labor-trafficking-worldwide/> diakses pada Senin 11 Oktober 2021 17:05 WIB

<https://www.foxnews.com/us/human-trafficking-in-america-among-worts-in-world-report> diakses Kamis 21 Oktober 2021 11:40 WIB

<http://www.ice.gov/features/human-trafficking> diakses Senin, 11 Oktober 2021 10:21 WIB

<https://borgenproject.org/10-facts-about-human-trafficking-in-thailand/> diakses Minggu, 28 November 2021 12:30 WIB

<https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2018/09/human-trafficking-in-southeast-asia-caballero.htm> diakses Minggu 28 November 2021 12:44 WIB

<http://thalawforum.com/articles/Trafficking-in-Thailand%20.html> diakses Minggu 28 November 2021 15:18 WIB

<https://www.nytimes.com/2017/07/19/world/asia/thailand-human-traffickingcase.html> diakses Selasa, 12 Oktober 2021 22:00 WIB

<https://www.hrw.org/news/2017/07/24/thailand-trafficking-convictions-important-step-forward> diakses Selasa, 12 Oktober 2021 33:32 WIB

<https://www.afp.gov.au/what-wedo/crime-types/human-trafficking> diakses Selasa 30 November 2021 15:14 WIB